

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL KPH GEDONG WANI  
(STUDI PADA DESA TRIHARJO, LAMPUNG SELATAN)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RISMA RAMADIAN NUR  
NPM 2056041004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL KPH GEDONG WANI  
(STUDI PADA DESA TRIHARJO, LAMPUNG SELATAN)**

Oleh

**RISMA RAMADIAN NUR**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRISI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL KPH GEDONG WANI (STUDI PADA DESA TRIHARJO, LAMPUNG SELATAN)**

Oleh :

**Risma Ramadian Nur**

Penelitian ini dilakukan di Desa Triharjo, Lampung Selatan, Lampung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani, khususnya di Desa Triharjo. Teori yang digunakan adalah analisis *stakeholder* Bryson (2004) yang mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam empat kelas, yaitu *subject*, *key player*, *crowd*, *context setter*. Hasil penelitian menunjukkan KPH Gedong Wani, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Pemerintah Desa Triharjo merupakan *stakeholder key players*, *Strengthening of Social Forestry Project* dan BPDAS Way Seputih Way Sekampung merupakan *stakeholder context setter*, Gapoktan dan masyarakat lokal yang tidak tergabung dalam perhutanan sosial merupakan *stakeholder subjects*, kemudian tidak ditemukan adanya *stakeholder* yang termasuk dalam kategori *crowds*. Koordinasi antar *stakeholder*, bantuan dan pendampingan, serta pemahaman terkait peraturan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini, sedangkan masih banyaknya pemukiman di kawasan hutan, adanya *trust issue* masyarakat dan pengaruh buruk media dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Triharjo.

**Kata Kunci : *Stakeholders*, Perhutanan Sosial, KPH Gedong Wani**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY POLICIES KPH GEDONG WANI (STUDY IN TRIHARJO VILLAGE, SOUTH LAMPUNG)**

**By :**

**Risma Ramadian Nur**

*This research was conducted in Triharjo Village, South Lampung, Lampung. This type of research is descriptive qualitative to describe the stakeholders involved in implementing Social Forestry policies in KPH Gedong Wani, especially in Triharjo Village. The theory used is Bryson's (2004) stakeholder analysis which classifies stakeholders into four classes, namely subject, key player, crowd, context setter. The research results show that KPH Gedong Wani, the Lampung Provincial Forestry Service and the Triharjo Village Government are key stakeholder players, the Strengthening of Social Forestry Project and BPDAS Way Seputih Way Sekampung are context setter stakeholders, Gapoktan and local communities who are not part of social forestry are stakeholder subjects, then no stakeholders were found who were included in the crowds category. Coordination between stakeholders, assistance and assistance, as well as understanding related regulations are supporting factors in implementing this policy, while there are still many settlements in forest areas, the existence of community trust issues and the bad influence of the media can be inhibiting factors in implementing Social Forestry policies in Triharjo Village.*

**Keywords : Stakeholders, Social Forestry, KPH Gedong Wani**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN  
SOSIAL KPH GEDONG WANI (STUDI PADA  
DESA TRIHARJO, LAMPUNG SELATAN)**

Nama Mahasiswa

: **Risma Ramadiah Nur**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2056041004

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**  
NIP 197209182002122002

  
**Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 196911032001121002

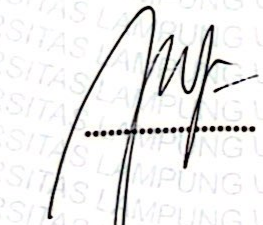
**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Meiliyana, S.I.P., M.A.**  
NIP 197405202001122002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

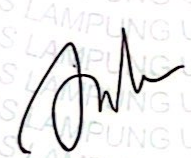
**Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



**Sekretaris : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



**Penguji : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si.**

**NIP 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian : 21 Januari 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Risma Ramadian Nur  
NPM 2056041004

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Risma Ramadian Nur, lahir di Kota Metro pada tanggal 12 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak M. Nur Ajis (alm) dan Ibu Rohmah. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Aisyah kemudian dilanjutkan SD Negeri 5 Sukadana Pasar yang diselesaikan tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Sukadana yang diselesaikan tahun 2017 dan SMA Negeri 6 Metro yang diselesaikan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS).

Pada bulan Juni-Agustus tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balairejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada bulan Juni-Agustus 2024 penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.



## MOTTO

” Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

(Baskara Putra)

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan  
nikmat dan hidayah-Nya*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,*

*Kupersembahkan karya tulis ini,*

*Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:*

### ***Papah (alm) Dan Mamah Tercinta***

*Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta  
support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan,  
motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan.*

### ***Keluarga Besarku Tersayang,***

*Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan  
dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.*

### ***Para Dosen dan Civitas Akademika,***

*Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan,  
dukungan, dan doa.*

### ***Almamater Tercinta,***

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL KPH GEDONG WANI (STUDI PADA DESA TRIHARJO, LAMPUNG SELATAN)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku, Papah tercinta (alm) M. Nur Ajis yang belum sempat melihat anaknya tumbuh dewasa dan Mamah Rohmah tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, motivasi hidup dan selalu ada setiap harinya, sehingga penulis tidak merasakan kekurangan apapun saat penyelesaian kuliah ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
2. Kakak ku tercinta Ayeng Kiki Dan Sejati Lisa, terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan motivasi yang sangat berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
4. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen pembimbing kedua dan dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.

5. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan kritik, serta bimbingan yang diberikan sehingga skripsi menjadi lebih baik.
6. Prof. Dr. Anna gustina zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Mba Uki dan Mba Wulan. Terimakasih banyak segala bantuan dan arahan yang telah diberikan, baik dalam urusan administrasi semasa perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh informan penelitian terima kasih atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
12. Seluruh Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama PKL dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nurman Abadi. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, selalu mendukung dan menjadi tempat mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Terima kasih kepada Namsquad Helda, Mia, Ipeh, Hazimah atas segala effort, doa, canda tawa yang telah mendukung penulis

sampai pada tahap ini. Semoga kita semua bisa sukses.

15. Member anak sholehah Resti, Esa, Atika, Denti, Nabila Dan Riska. Terima kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa, ketulusan hingga telah memberikan warna selama perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses.
16. Terima kasih kepada Dewi dan Queen yang telah membantu serta mendukung penulis sampai pada tahap ini.
17. Untuk teman-teman PKL Reza, Indi, Alya, Wulan, Elfani, Fatoni terima kasih atas dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini.
18. Beban Negara Aywa, Namira, Puja, Pike, Nisa terima kasih atas dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini.
19. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Penulis,

Risma Ramadian Nur

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Kebijakan Publik .....	10
2.3. Teori <i>Stakeholder</i> .....	13
2.4. Analisis <i>Stakeholder</i> .....	16
2.5. Perhutanan Sosial (PS).....	23
2.6. Kerangka Pikir .....	25
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	27
3.2. Fokus Penelitian .....	28
3.3. Lokasi Penelitian .....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4.1. Jenis Data.....	29
3.4.2. Sumber Data .....	29

3.5. Teknik Analisis Data .....	33
3.6. Teknik Keabsahan Data .....	34
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Gambaran Umum .....	36
4.1.1. Profil Desa Triharjo.....	36
4.1.2. Kondisi Geografis Desa Triharjo .....	36
4.1.3. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani.....	37
4.2. Hasil Penelitian.....	37
4.2.1. Kepentingan ( <i>Interest</i> ).....	39
4.2.2. Pengaruh ( <i>Influence</i> ) .....	63
4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) KPH Gedong Wani di Desa Triharjo Lampung Selatan.....	82
4.3. Pembahasan.....	87
4.3.1. <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani Desa Triharjo Lampung Selatan .....	88
4.3.2. Klasifikasi Kepentingan ( <i>Interest</i> ) dan Pengaruh ( <i>Influence</i> ) <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani .....	98
4.3.3. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) KPH Gedong Wani di Desa Triharjo Lampung Selatan .....	113
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>118</b>
5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>125</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 1. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Triharjo Terhadap Program Perhutanan Sosial .....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3. Observasi Penelitian .....	30
Tabel 4. Data Informan Penelitian.....	31
Tabel 5. Dokumentasi Penelitian .....	32
Tabel 6. Letak Geografis Desa Triharjo.....	36
Tabel 7. Stakeholder Primer dalam Implementasi Perhutanan Sosial Desa Triharjo .....	97
Tabel 8. Stakeholder Sekunder dalam Implementasi Perhutanan Sosial Desa Triharjo.....	98
Tabel 9. Analisis Stakeholder Teori Bryson dalam Implementasi Perhutanan Sosial Desa Triharjo.....	108
Tabel 10. Kekuatan Setiap Stakeholder dalam Implementasi Perhutanan Sosial Desa Triharjo .....	111



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Data Statistik Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia .....	3
Gambar 2. Matriks Kepentingan (Interest) vs Pengaruh (Influence).....	20
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4. Matriks Kepentingan (Interest) vs Pengaruh (Influence).....	28
Gambar 5. Surat Keputusan KUPS Malantri Bee Farm .....	46
Gambar 6. Pengolahan Budidaya Lebah Madu Trigona Itama KTH Maju Lancar .....	47
Gambar 7. Lokasi dan Penempatan Bibit-Bibit Lebah Madu .....	48
Gambar 8. Data Hasil Produk KUPS Malantri Bee Farm.....	74
Gambar 10. Klasifikasi Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani di Desa Triharjo.....	112
Gambar 9. Faktor Pendukung dan Penghambat Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani Desa Triharjo.....	117

## DAFTAR ISTILAH

### **Degradasi Hutan**

Proses penurunan kualitas atau jumlah tutupan hutan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia.

### **Tenurial**

Hubungan hukum antara individu atau kelompok dengan suatu lahan atau wilayah tertentu yang terkait dengan hak kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan lahan tersebut.

### ***Stakeholder***

Para pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya.

### ***Stakeholder Key Player***

Para pihak dengan kepentingan dan pengaruh tinggi, yang memiliki otoritas besar dan peran utama dalam implementasi kebijakan.

### ***Stakeholder Subject***

Para pihak dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah yaitu pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam kebijakan, namun pengaruhnya terbatas.

### ***Stakeholder Context Setter***

Para pihak dengan kepentingan rendah dan pengaruh tinggi yaitu pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap konteks atau lingkungan kebijakan.

### ***Stakeholder Crowds***

Para pihak yang memiliki kepentingan rendah dengan kekuatan kecil terhadap proyek.

### **Perhutanan sosial**

Program pemerintah untuk pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat

setempat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan melestarikan budaya.

**Interest** (Kepentingan)

kepentingan atau kebutuhan yang dimiliki oleh stakeholder terkait kebijakan tersebut. Stakeholder dengan interest yang tinggi memiliki perhatian besar terhadap dampak kebijakan terhadap mereka.

**Influence** (Pengaruh)

kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi proses perumusan, pelaksanaan, atau hasil dari kebijakan yang dibuat. Stakeholder dengan influence tinggi dapat mengubah arah atau keputusan kebijakan.

**Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini KPH Gedong Wani yang mengelola kawasan hutan di Desa Triharjo.

***Strengthening of Social Forestry (SSF) Project***

Proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Global Environment Facility (GEF), dan The World Bank (WB). Proyek ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target program nasional Perhutanan Sosial.

**Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Proses pemulihan kondisi ekosistem hutan dan lahan yang telah rusak atau terdegradasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam.

**Kelompok Tani Hutan (KTH)**

Organisasi yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat lokal yang berperan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam program Perhutanan Sosial.

**Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan)**

Organisasi yang terdiri dari gabungan beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk meningkatkan skala usaha, kolaborasi antar kelompok, serta koordinasi dan pengembangan usaha bersama dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Istilah “hutan” merujuk pada suatu wilayah lahan dengan komponen biotik dan abiotik yang mengandung ekosistem yang saling bergantung dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini setara dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1, yang mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Selain sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon, hutan di Indonesia memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan sering kali menimbulkan konflik terkait akses lahan, degradasi hutan, dan kesenjangan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah meluncurkan Kebijakan Perhutanan Sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketimpangan penguasaan lahan, konflik tenurial, kesenjangan ekonomi masyarakat, laju deforestasi (perubahan kondisi tutupan lahan kategori hutan menjadi tutupan lahan non-hutan), dan degradasi (penurunan jumlah tutupan hutan dan cadangan karbon dalam kurun waktu tertentu) hutan Indonesia merupakan permasalahan yang masih menjadi isu dalam pengelolaan hutan hingga saat ini (Tamara, 2020). Kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihentikan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kepedulian

masyarakat terhadap hutan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan (Banuwa et.al., 2018).

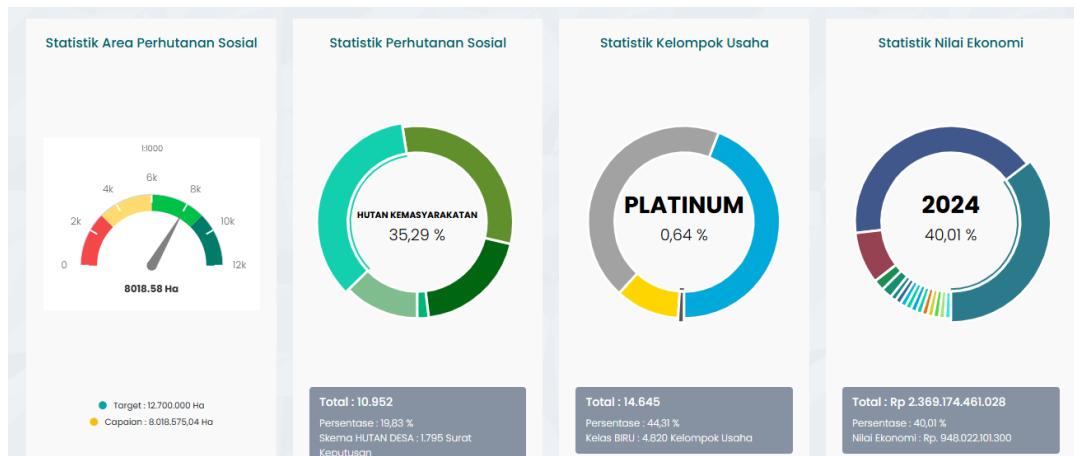
Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui skema yang memungkinkan mereka terlibat secara langsung dalam pemanfaatan dan perlindungan hutan. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses lahan dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam konservasi hutan. Selain itu, melalui program ini, masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi berbasis hasil hutan yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan kawasan dan komoditas hutan, serta kesempatan untuk membuat organisasi bisnis.

Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi strategi penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan sosial di Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 memuat kebijakan Perhutanan Sosial. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 juga memuat kebijakan Perhutanan Sosial. Pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan, dan Hutan Adat merupakan bentuk program Perhutanan Sosial (PS) yang meredistribusi lahan.

Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan akses dan hak kelola atas hutan. Data menunjukkan penurunan deforestasi netto sebesar 75% dari tahun 2018-2019 ke tahun 2019-2020, berkat berbagai upaya pengelolaan hutan yang lebih baik, termasuk kebijakan Perhutanan Sosial (PS).

Perhutanan Sosial tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya melalui praktik agroforestry dan silvopastura yang mendukung keberlanjutan ekosistem hutan. Dalam hal ini, Perhutanan Sosial juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu dengan menciptakan lebih dari 10.249 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan total transaksi ekonomi mencapai Rp 1,08 Triliun.

Berikut merupakan statistika data Perhutanan Sosial (PS) yang bersumber dari *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara *online* dan *real time* yang diakses pada 20 November 2024:



**Gambar 1. Data Statistik Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia**

*Sumber: Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (<https://gokups.menlhk.go.id/public/home>)*

Gambar di atas merupakan data statistik Perhutanan Sosial di Indonesia. Statistik pertama ialah data yang menunjukkan area perhutanan sosial yang telah mencapai 8.018.58 Ha dengan target 12.700 Ha. Statistik kedua merupakan skema Perhutanan Sosial dengan statistik paling tinggi ialah Hutan Kemasyarakatan, disusul Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan total 10.952 Surat Keputusan. Statistik ketiga merupakan kelas kelompok usaha, yang di mana kelompok usaha dengan kelas platinum masih memiliki persentase yang sedikit, yaitu 0,64% atau 70 kelompok usaha. Dan

terakhir, statistik nilai ekonomi menunjukkan di tahun 2024, Perhutanan Sosial telah menyumbangkan kontribusinya untuk perekonomian dengan capaian persentase 40,01% atau Rp948.022.101.300.

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu pihak yang terpengaruh dan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Peran utama *stakeholder* yaitu membantu membuat kebijakan agar sesuai dan tercapai dengan arah pengembangan organisasi. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada *stakeholder* yang terkait dan berperan langsung dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (Situmorang, 2023).

*Stakeholder* memiliki kepentingan dan akan membawa pengaruh bahkan dapat menyebabkan perubahan dasar dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial. Oleh karena itu, dibalik kesuksesan implementasi kebijakan terdapat peran atau pengaruh (*influence*), dan kepentingan (*interest*) pihak terkait kebijakan perhutanan sosial. *Stakeholder* yang terlibat dapat berupa lembaga formal, non formal maupun individu. Pemetaan *stakeholder* penting dilakukan karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, dan sikap mereka terhadap suatu kebijakan. Pengelompokan ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta seberapa besar perannya dalam implementasi perhutanan sosial.

Dalam implementasinya, Kebijakan Perhutanan Sosial di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Di Desa Triharjo, Lampung Selatan, yang menjadi bagian dari wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, masyarakat menghadapi berbagai kendala yang menghambat partisipasi mereka dalam program ini. Salah satu kendala utama adalah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pengambilalihan lahan yang secara turun-temurun telah menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat kebijakan ini membuat masyarakat ragu untuk terlibat dalam pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Meskipun

demikian, Desa Triharjo merupakan lokasi strategis yang digunakan sebagai area operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani.

Isu utama terkait dengan pengelolaan hutan di Desa Triharjo, Lampung Selatan, ialah mengenai masyarakat yang enggan bergabung dengan program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh pemerintah karena adanya rasa *trust issue*. Berikut merupakan beberapa faktor dibalik terjadinya rasa enggan tersebut yang peneliti dapatkan dari hasil pra-riset:

**Tabel 1. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa Triharjo Terhadap Program Perhutanan Sosial**

No	Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat	Penjelasan
1	Faktor Pengetahuan	Banyak anggota masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang program perhutanan sosial. Pendidikan yang rendah dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan membuat mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai manfaat dan mekanisme program tersebut.
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi hutan. Kebiasaan membuka lahan untuk pertanian sering kali mengakibatkan hilangnya hutan, sehingga mereka tidak melihat relevansi program perhutanan sosial dalam konteks keberlanjutan lingkungan.
3	Kekhawatiran Ekonomi	Masih terdapat petani yang khawatir bahwa program ini akan mengurangi lahan yang dapat mereka garap. Mereka beranggapan bahwa perhutanan sosial dapat membatasi akses mereka terhadap lahan pertanian yang sudah ada, sehingga mengancam mata pencaharian mereka.
4	Asumsi Masyarakat	Proses pengajuan untuk mendapatkan akses ke perhutanan sosial sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Masyarakat harus memenuhi syarat administratif yang ketat, termasuk pembuktian kepemilikan tanah yang kadang sulit dilakukan.
5	Rasa Ketidakpercayaan	Rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dari pengalaman sebelumnya, seperti konflik agraria atau ketidakjelasan status lahan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap inisiatif baru seperti perhutanan sosial.

*Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Desa Triharjo, 2024*

Tabel di atas ialah merupakan penjabaran faktor dibalik rendahnya keinginan masyarakat untuk bergabung dalam menyukseskan program Perhutanan Sosial (PS) yang dicanangkan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi dan program yang ada, tetapi juga pada keterlibatan aktif dan dukungan dari berbagai *stakeholder*. *Stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap kebijakan ini, baik dari sektor



pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan program berjalan sesuai tujuan. Dengan peran yang jelas dan koordinasi yang efektif, stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memfasilitasi masyarakat, memberikan dukungan informasi, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani (Studi Pada Desa Triharjo, Lampung Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo. Dengan memahami siapa saja *stakeholder* yang terlibat, peran mereka dalam proses implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi optimalisasi kolaborasi stakeholder dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Siapa saja *stakeholder* utama yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo?
2. Bagaimana peran masing-masing *stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas peran *stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *stakeholder* utama yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo.
2. Menganalisis peran dan pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam proses implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektifitas peran *stakeholder* dalam keberhasilan implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di tingkat lokal.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis  
Memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam pemahaman mengenai peran dan pengaruh *stakeholder* dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia.
2. Manfaat Praktis  
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat tentang strategi pengelolaan peran *stakeholder* dalam mendukung kebijakan perhutanan sosial yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
3. Manfaat Kebijakan  
Menyediakan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan kolaborasi *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi publik dalam implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode dan Teori	Relevansi Penelitian
1	Hastanti & Raharjo (2021)	Analisis Para Pihak Pada Implementasi Program Perhutanan Sosial di KPH Telawa, Jawa Tengah	Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, sebagai perpanjangan tangan gubernur dan pemangku wilayah, Perum Perhutani sebagai pemangku dan pengelola hutan, Balai PSKL sebagai perpanjangan Menteri LHK dan fasilitator Perhutanan Sosial, pemegang IPHPS yang mendapat mandat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan serta pendamping lapangan sebagai fasilitator masyarakat.	Metode: perpaduan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Teori: Identifikasi karakteristik <i>stakeholder</i> menurut Crosby, 1991 ( <i>Primary stakeholder</i> , <i>Secondary stakeholder</i> , <i>Key stakeholder</i> ).  Kemudian matriks <i>stakeholder</i> menurut Ackerman & Eden, 2011. Identifikasi analisis peran <i>stakeholder</i> dengan pendekatan 3R ( <i>Right, Responsibilities, Revenues</i> ).	Persamaan: Fokus penelitian yaitu menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam implementasi program Perhutanan Sosial  Perbedaan: Terletak pada lokus penelitian, metode dan teori yang digunakan. Penelitian yang saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori analisis peran <i>stakeholder</i> Bryson (matriks kepentingan dan pengaruh).

2	Situmorang (2023)	Analisis <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	<i>Key player:</i> UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pokja PPS, dan 17 Kelompok Tani Hutan. <i>Subject:</i> UNILA dan ITERA. <i>Context Setter:</i> Balai BPKHTL dan WALHI. <i>Crowd:</i> Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pengelolaan kolaboratif sangat perlu dilakukan agar terjadi pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab secara adil kepada semua <i>stakeholder</i> .	Metode: Pendekatan kuantitatif dengan statistika deskriptif. Teori: Analisis menggunakan teori Reed et al (2009).	Persamaan: Tema penelitian yaitu mengenai analisis peran <i>stakeholder</i> terhadap suatu kebijakan. Perbedaan: Terletak pada lokasi penelitian, metode dan teori yang digunakan. saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori analisis peran <i>stakeholder</i> Bryson (matriks kepentingan dan pengaruh).
3	Hidayah (2019)	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan Wisata Talang Air terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan sektor privat. Kerjasama dan komunikasi yang terjalin antar <i>stakeholder</i> relatif baik.	Metode: Deskriptif pendekatan kualitatif. Teori: Indikator <i>stakeholder</i> Townsley ( <i>stakeholder</i> primer dan <i>stakeholder</i> sekunder). Analisis peran <i>stakeholder</i> menurut Bryson ( <i>context setter, players, subject, dan crowd</i> ).	Persamaan: Terletak pada metode penelitian, tema penelitian yaitu analisis peran <i>stakeholder</i> , dan teori Bryson yang digunakan. Perbedaan: Lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu menganalisis peran <i>stakeholder</i> terhadap tempat wisata, sedangkan penelitian yang saat ini menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka didapati relevansi penelitian berupa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yang menganalisis peran *stakeholder*, terdapat juga persamaan fokus penelitian pada analisis peran *stakeholder* pada implementasi program Perhutanan Sosial namun teori yang digunakan berbeda. Sementara itu perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis peran *stakeholder* terhadap tempat wisata dan terhadap kebijakan kemitraan konservasi, kemudian lokasi penelitian, metode penelitian, dan teori yang digunakan juga terdapat perbedaan. Pada penelitian terdahulu belum dijabarkan analisis faktor yang dapat mempengaruhi implementasi program dan juga dapat mempengaruhi *stakeholder* dalam melaksanakan perannya. Oleh karena itu, dalam penelitian sekarang, peneliti akan menjabarkan faktor yang dapat mempengaruhi, baik dalam bentuk faktor pendukung maupun penghambat berdasarkan interaksi antar *stakeholder*.

## **2.2. Kebijakan Publik**

Seperangkat rencana program, kegiatan, keputusan, tindakan, dan sikap yang dilakukan oleh para pihak (aktor kebijakan) sebagai langkah penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi dapat disebut sebagai kebijakan. Menurut Friedrich, kebijakan adalah saran yang dibuat oleh orang, organisasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Sejalan dengan Friedrich, Sharkansky yang dikutip dalam Kustriani (2015) menggambarkan kebijakan sebagai suatu kegiatan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik menurut Anderson adalah serangkaian keputusan yang disengaja yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan. Lester dan Stewart menggambarkan kebijakan sebagai tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sederhananya, kebijakan publik adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah yang menguraikan solusi terbaik

terhadap situasi tertentu.

Kebijakan Perhutanan Sosial diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan di hutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pengelolaan hutan, merupakan reformasi agraria dari industri kehutanan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial-budaya, masyarakat lokal atau masyarakat adat berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam perhutanan sosial, sebuah cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan di kawasan hutan. Melalui program ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola lahan hutan, termasuk pemanfaatan kawasan dan komoditas hutan, serta kesempatan untuk membuat organisasi bisnis yang akan meningkatkan taraf ekonomi.

Kebijakan publik diikuti dan dilaksanakan oleh para aktor (*stakeholder*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Semakin kuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, maka semakin baik rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut sehingga mendukung efektivitas implementasi dan penegakan kebijakan. Untuk meningkatkan transparansi, menumbuhkan kepercayaan publik, dan menurunkan risiko implementasi, partisipasi pemangku kepentingan dan konsultasi publik sangatlah penting. Memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan akan mengatasi permasalahan sosial adalah tanggung jawab analis kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan publik diciptakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan bukan hanya kepentingan organisasi atau pembuat kebijakan tertentu.

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022), kebijakan publik terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Kebijakan Substantif dan Kebijakan Procedural

Kebijakan substantif berkaitan dengan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan prosedural berfokus pada cara pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Kebijakan Distributif, Kebijakan Regulatori, dan Kebijakan Redistributif

Kebijakan distributif merupakan cara penyebaran layanan atau

penggunaan barang-barang kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang melibatkan pembatasan atau pelarangan perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif ialah kebijakan yang mengatur bagaimana kekayaan, pendapatan, milik, serta hak-hak disebarluaskan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### 3. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang secara rinci memberikan keuntungan sumber daya kepada kelompok yang ditargetkan. Sementara itu, kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran tersebut.

### 4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum adalah kebijakan yang mengatur distribusi barang atau layanan publik. Sementara itu, kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau layanan dalam pasar bebas.

Dalam penelitian ini, kebijakan perhutanan sosial dapat dikategorikan sebagai kebijakan substansif dan prosedural karena mencakup dua aspek utama dalam pelaksanaannya. Secara substansif, kebijakan ini berfokus pada tindakan konkret yang diambil pemerintah untuk memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif. Di sisi lain, kebijakan perhutanan sosial juga memiliki dimensi prosedural yang sangat penting, yaitu mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti proses pendaftaran kelompok masyarakat, verifikasi hak kelola, serta pengawasan dan pelaporan yang harus dipatuhi oleh masyarakat pengelola. Prosedur-prosedur ini memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pengelolaan hutan yang lebih terstruktur. Teori kebijakan publik membantu untuk melakukan analisis keterlibatan *stakeholder* karena teori kebijakan publik menyediakan

kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana berbagai *stakeholder* terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Di Desa Triharjo, pemetaan peran *stakeholder* dapat membantu memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Penelitian ini termasuk ke dalam implementasi kebijakan publik pada sektor lingkungan, yaitu implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) pada lingkungan kawasan hutan. Implementasi kebijakan di sektor lingkungan menjadi fokus penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini meliputi sumber daya manusia yang harus dikembangkan kompetensi dan kapasitasnya, koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, dan dukungan finansial dengan memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung terlaksananya proyek yang telah direncanakan (Riduan, 2024).

### **2.3. Teori Stakeholder**

Interaksi antara politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya tercermin dalam kebijakan publik. Proses pengambilan kebijakan dapat dipengaruhi oleh banyak individu dari berbagai sektor berdasarkan kepentingan masing-masing. Tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang kepentingannya tidak diperhitungkan dapat berdampak pada seberapa baik dan efisien suatu kebijakan mencapai tujuannya. Sistem pemangku kepentingan adalah sistem yang secara khusus didasarkan pada pemahaman tentang suatu organisasi dan lingkungannya, dengan mempertimbangkan sifat interaksi mereka yang rumit dan selalu berubah. Dalam arti yang lebih luas, pemangku kepentingan adalah individu-individu yang saling terhubung dan tertarik serta menaruh perhatian terhadap suatu program atau kegiatan. Menurut Bryson (2004), pemangku kepentingan adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang terkena dampak keluaran atau sumber daya organisasi.



Keberhasilan implementasi kebijakan publik yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan memerlukan kerjasama aktor yang efektif. Para pelaku kebijakan berasal dari berbagai institusi yang merupakan bagian dari infrastruktur dan suprastruktur politik, menurut penelitian Anderson tentang proses pembuatan kebijakan. Legislator, eksekutif, lembaga peradilan, kelompok penekan, partai politik, media, organisasi masyarakat, aparat administrasi atau birokrasi, kelompok swasta, kelompok think tank, kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kabinet bayangan adalah beberapa di antaranya. yang digunakan para ahli untuk mengidentifikasi aktor-aktor ini. Sebaliknya, Moore sering menegaskan bahwa aktor-aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil semuanya terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, ketiga pemain tersebut berperan penting (Kustriani, 2015). Ada dua jenis aktor yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan: formal dan nonformal. Para pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan kebijakan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, biasanya merupakan kelompok formal. Sedangkan aktor nonformal adalah masyarakat, individu, kelompok kepentingan, dan aktor partai politik.

Untuk memahami hubungan antara berbagai pihak dalam kebijakan publik, pemangku kepentingan harus diidentifikasi. Pemangku kepentingan menentukan kualitas kebijakan dan struktur hubungan. Selain itu, untuk mengamati hubungan antara kinerja dan keterlibatan mereka dalam suatu kebijakan dan keberhasilan kebijakan serta administrasi kebijakan selanjutnya. Peran dan kinerja maksimal pemangku kepentingan akan menghasilkan kebijakan yang sangat sukses. Bryson (2004) mengemukakan bahwa langkah pertama dalam menganalisis peran pemangku kepentingan adalah dengan menyusun mereka dalam matriks dua-dua sesuai dengan kepentingan mereka terhadap suatu masalah dan kekuatan mereka untuk mempengaruhinya. Kepentingan adalah kepentingan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan kekuasaan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan untuk mempengaruhi atau mengambil kebijakan. Hubungan antar pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan publik membuktikan bahwa suatu kebijakan tidak lepas dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam

kebijakan publik itu sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan Lattimore dkk. (2010) yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan mempunyai konsekuensi satu sama lain, dimana organisasi dapat menciptakan peluang dan masalah bagi satu sama lain.

Donaldson dan Preston (1995) membagi teori *stakeholder* menjadi tiga jenis teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Deskriptif, yaitu teori *stakeholder* digunakan dalam memberikan keterangan terkait dengan karakter khusus serta perilaku perusahaan atau entitas.
2. Teori Instrumental, yaitu sebagai pelengkap dari data deskriptif yang digunakan untuk mengenali hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan atau entitas dengan hasil yang diperoleh, seperti profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan aspek lainnya.
3. Teori Normatif, yaitu teori *stakeholder* yang dapat bermanfaat dalam memahami peran perusahaan, termasuk dalam mengidentifikasi pedoman etika serta pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan manajemen perusahaan.

Teori *stakeholder* sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya memperhatikan berbagai pihak yang terlibat, bukan hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga memberikan manfaat bagi *stakeholder* lainnya, termasuk masyarakat Desa Triharjo. Penerapan teori *stakeholder* diharapkan dapat mengoptimalkan nilai sosial dan ekonomi, sejalan dengan tujuan diimplementasikannya program Perhutanan Sosial yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga semua pihak dapat merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Dalam implementasinya, kesuksesan suatu program memerlukan kerja sama (kolaborasi) di antara para *stakeholders* dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih efektif melalui sinergi antar berbagai pihak yang terlibat. Berikut merupakan beberapa model kolaborasi *stakeholder*:

1. Model SFIC (*Stakeholder Framework for Interactive Collaboration*)

(Ansell dan Gash).

Model ini memiliki elemen utama yaitu perbedaan sumber daya, insentif kolaborasi, riwayat kerjasama, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dialog antar muka, kepercayaan, dan komitmen. Sementara itu karakteristik dalam model ini adalah menekankan pada proses siklus dalam kolaborasi, di mana interaksi antar *stakeholder* membentuk konsensus dan pemahaman bersama (Irmadella, 2018).

2. Model CGR (*Collaborative Governance Regime*) (Emerson, Nabatchi, dan Balogh).

Model ini memiliki fokus utama membangun kerjasama yang efektif melalui komunikasi yang jelas dan pemahaman bersama di antara *stakeholder*. Adapun komponen dalam model CGR adalah dialog, kepercayaan, komitmen, dan dampak sementara dari kolaborasi. Model ini menekankan pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antara semua pihak (Septiani, Nurcahyanto, dan Marom., 2021).

3. Model Pentahelix.

Memiliki tujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan desa wisata atau proyek lainnya dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing elemen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komponen utama model pentahelix ialah melibatkan lima elemen utama, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media (Kumala, Raharjo, Musleh, dan Lubis., 2024).

#### **2.4. Analisis Stakeholder**

Menurut Freeman, pemangku kepentingan adalah kelompok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kemampuan perusahaan dan/atau komunitas untuk mencapai tujuannya (Izza et al., 2021). Keputusan-keputusan yang diambil mempunyai potensi untuk mempengaruhi (*give impact*) dan terkena dampak (*receive impact*) oleh para pemangku kepentingan. Orang, organisasi, atau kelompok yang berkepentingan dan/atau mempunyai dampak terhadap hasil dan kemampuan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya juga disebut sebagai

pemangku kepentingan.

Pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu dalam menilai lingkungan kegiatan dan dapat mengidentifikasi strategi terbaik untuk melakukan negosiasi dalam perbincangan mengenai kegiatan, yaitu gambaran kepentingan pemangku kepentingan sehubungan dengan pembentukan atau implementasi kebijakan: mengidentifikasi kemungkinan konflik antar pemangku kepentingan karena perbedaan kepentingan, yang dapat membahayakan pelaksanaan aktivitas yang semestinya. kebijakan, membantu menentukan jenis partisipasi yang diharapkan dari berbagai pemangku kepentingan, dan memetakan pola hubungan antar pemangku kepentingan sehingga dapat diperhitungkan ketika menciptakan koalisi atau kolaborasi.

Townsley membagi pemangku kepentingan menjadi kategori primer dan sekunder (Hidayah, 2019). Berbeda dengan pemangku kepentingan sekunder, yang mempunyai kepentingan tidak langsung atau bergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang diciptakan oleh sumber daya, pemangku kepentingan primer mempunyai kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai sumber pendapatan atau sebagai peserta langsung dalam eksploitasi. Hetifah dalam Sulastri (2017) dalam hal ini juga mengemukakan bahwa kekuatan posisi penting dan pengaruh *stakeholder* dapat dikategorikan kedalam *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Primer

Setiap *stakeholder* yang langsung terkait dengan masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai *stakeholder* primer. *Stakeholder* primer biasanya memainkan peranan krusial dan wajib terlibat dalam proses pembuatan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Mereka seringkali menjadi faktor utama dalam proses ini. Beberapa contoh dari *stakeholder* primer termasuk pemilik saham, investor, pekerja, pelanggan, serta pemasok.

2. *Stakeholder* Sekunder

*Stakeholder* sekunder adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan suatu isu tertentu. Meskipun mereka tidak berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan terkait masalah tersebut, mereka

memiliki perhatian dan kepedulian yang dapat mempengaruhi opini publik serta keputusan pemerintah. Contoh dari *stakeholder* sekunder meliputi konsumen, pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Sementara itu, Thompson dalam Sulastrri (2017) mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Subyek

*Stakeholder* ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam mencapai tujuan, namun dapat memberikan dampak dengan menjalin aliansi bersama *stakeholder* lain.

2. *Stakeholder* Kunci

*Stakeholder* kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan atau yang berpengaruh penting terhadap kelancaran suatu kegiatan. Ini termasuk unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, dan instansinya. Contoh *stakeholder* kunci dalam keputusan kebijakan daerah kabupaten meliputi pemerintah kabupaten, DPRD, dan dinas terkait kebijakan tersebut.

3. *Stakeholder* Pendukung

*Stakeholder* pendukung adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan, tetapi peduli dan berpengaruh terhadap opini masyarakat serta keputusan pemerintah. Contoh *stakeholder* pendukung meliputi lembaga pemerintah daerah tanpa tanggung jawab langsung, lembaga pemerintah terkait isu tanpa kewenangan pengambilan keputusan, LSM lokal yang fokus pada rencana dan dampak kebijakan, perguruan tinggi yang berpengaruh dalam keputusan pemerintah, dan pengusaha atau badan usaha yang terkait.

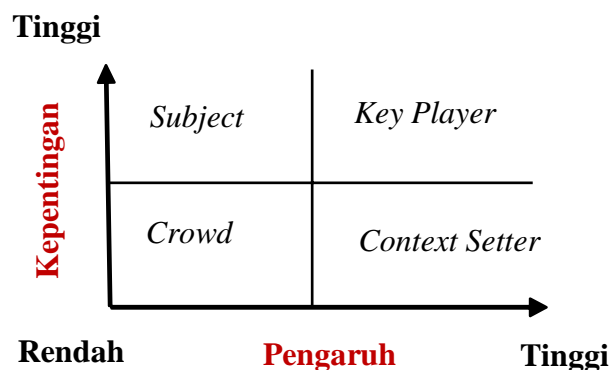
4. *Stakeholder* Pengikut Lain

*Stakeholder* pengikut lain adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan, program, dan proyek. Mereka perlu menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa kelompok terkait meliputi masyarakat (mereka yang akan mendapatkan manfaat atau terdampak oleh proyek atau kebijakan), tokoh masyarakat

(anggota masyarakat yang dianggap mewakili aspirasi masyarakat setempat), pihak manajer publik (lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan).

Berdasarkan perannya dalam suatu program, pemangku kepentingan dikategorikan sebagai berikut: pembuat kebijakan bertanggung jawab mengambil keputusan dan memutuskan suatu kebijakan; koordinator bertanggung jawab untuk berkoordinasi di antara pemangku kepentingan yang berpartisipasi; fasilitator bertanggung jawab memenuhi kebutuhan objek sasaran; pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ketika terdapat objek sasaran dalam kebijakan; dan akselerator bertanggung jawab memberikan kontribusi dan pengaturan waktu guna memastikan program terlaksana secara tepat, sesuai target, dan lebih cepat selesai.

Menurut Bryson (2004), untuk memperjelas peran masing-masing *stakeholder* dalam suatu proyek atau organisasi, dapat digunakan matriks kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Matriks ini berfungsi untuk mengkategorikan *stakeholder* ke dalam beberapa kelompok yang berbeda, yang meliputi *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Dengan cara ini, organisasi dapat lebih mudah memahami dan mengelola hubungan dengan setiap kelompok, serta menentukan strategi komunikasi yang paling efektif berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap keputusan yang diambil. Kategorisasi ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan tersebut.



**Gambar 2. Matriks Kepentingan (*Interest*) vs Pengaruh (*Influence*)**

*Sumber: Bryson (2004)*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1. *Key players* merupakan *stakeholder* aktif yang menunjukkan ciri-ciri berikut: tingkat ketertarikan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan proyek; keterlibatan sebagai regulator, pelaksana, fasilitator, dan evaluator yang memberikan dampak besar terhadap realisasi proyek atau program; kemampuan untuk mempengaruhi struktur proyek atau program; dan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Sering kali dikatakan bahwa para partisipan kunci memiliki sifat-sifat yang menjadikan mereka aktor yang efektif dalam pembuatan kebijakan.
2. *Context setters* merupakan *stakeholder* yang memiliki kualitas pengaruh yang tinggi namun kepentingannya rendah, sehingga menjadikan mereka berisiko besar untuk diperhatikan dan merupakan pemain kunci dalam pembuatan kebijakan.
3. *Subjects* merupakan *stakeholder* yang menunjukkan ciri-ciri mempunyai kepentingan yang kuat namun pengaruhnya kecil. Meskipun mereka mendukung inisiatif, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang signifikan atau berdampak kecil, namun mereka dapat memperoleh pengaruh dengan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.
4. *Crowds* merupakan *stakeholder* yang perlu dipertimbangkan untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan karena mereka adalah pemangku kepentingan yang

mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap hasil yang diharapkan.

Penggunaan teori Bryson dalam analisis peran *stakeholder* sebagai teori utama dibandingkan dengan teori yang lain karena teori Bryson menggunakan pendekatan matriks dua kali dua yang memungkinkan untuk dilakukannya identifikasi yang lebih jelas terhadap peran dan pengaruh setiap *stakeholder*.

Untuk melihat kepentingan (*Interest*) *stakeholder* dalam suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Keterlibatan *Stakeholder*

Keterlibatan pemangku kepentingan meliputi cara mereka berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan serta sejauh mana pengaruh mereka terhadap hasil yang dicapai. Analisis ini berguna untuk menentukan siapa yang perlu dilibatkan di setiap fase proyek atau kebijakan.

2. Manfaat Pengelolaan bagi *Stakeholder*

Yaitu mengacu pada manfaat yang dapat diraih oleh pemangku kepentingan melalui manajemen yang baik, yang mencakup peningkatan hubungan serta dukungan terhadap berbagai inisiatif yang dilaksanakan. Pemetaan pemangku kepentingan dapat mengungkapkan bagaimana pengelolaan yang efisien dapat meningkatkan kepuasan dan dukungan dari para pemangku kepentingan.

3. Kewenangan *Stakeholder*

Kewenangan atau kekuasaan stakeholders ditentukan oleh besarnya pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan. Biasanya, hal ini diperiksa menggunakan matriks kekuatan dan kepentingan, dimana stakeholders dengan kekuatan dan kepentingan yang tinggi harus mendapat perhatian istimewa.

4. Ketergantungan *Stakeholder*

Ketergantungan ini mencerminkan sejauh mana suatu organisasi bergantung pada pemangku kepentingan tertentu untuk mencapai tujuannya. Pemangku kepentingan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi biasanya menjadi fokus utama dalam analisis.



Sementara itu, untuk melihat pengaruh (*Influence*) setiap *stakeholder* dalam suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Kekuatan *Stakeholder*

Kekuatan *stakeholder* adalah kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan dan hasil kebijakan. *Stakeholder* yang kuat, seperti lembaga pemerintah atau perusahaan besar, memiliki sumber daya dan dukungan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, serta dapat mengukur pengaruh mereka melalui kemampuan mobilisasi sumber daya atau pembentukan opini publik.

2. Kelayakan *Stakeholder*

Kelayakan *stakeholder* terkait relevansinya dan pentingnya bagi kebijakan analisis. Mereka dinilai layak jika memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap hasil kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan aspek etis dan sosial. Misalnya, masyarakat lokal yang terkena dampak proyek pembangunan harus ikut diskusi dan perencanaannya.

3. Kompensasi *Stakeholder*

Kompensasi *stakeholder* adalah imbalan yang diterima sebagai hasil dari kebijakan, seperti keuntungan finansial, akses layanan, atau peningkatan kualitas hidup. Dalam analisis kebijakan, penting untuk mempertimbangkan dampak kompensasi ini terhadap sikap dan perilaku *stakeholder*. Mereka cenderung mendukung kebijakan jika merasa mendapatkan kompensasi yang adil sesuai kontribusi atau risiko yang diambil.

4. Kekuatan Organisasi *Stakeholder*

Kekuatan organisasi *stakeholder* mencerminkan kemampuan kolektif mereka untuk mempengaruhi kebijakan, termasuk struktur, sumber daya manusia, dan jaringan yang dimiliki. Organisasi yang kuat dapat melakukan lobi, membangun aliansi strategis, dan memperoleh dukungan publik, serta efektif dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi opini publik serta pembuat kebijakan.

## 2.5. Perhutanan Sosial (PS)

Perhutanan Sosial (PS) adalah suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial. Bentuknya berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Pada kawasan hutan negara dan/atau hutan hak, perhutanan sosial didefinisikan oleh Kementerian Kehutanan sebagai suatu metode pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan/atau kolaborator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kelestarian hutan. . Bertujuan untuk mendorong terbentuknya sistem usaha kehutanan yang kompetitif, pengelolaan wilayah, dan kelembagaan berbasis masyarakat lokal, perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang memadukan sumber daya alam dengan potensi lain yang ada, baik sumber daya pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, tujuan perhutanan sosial adalah membangun sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat sebagai pelaku utama dan/atau peserta pengelolaan hutan.dalam rangka pengelolaan hutan lestari (Hakim et al., 2010).

Tanpa harus membagi dan mengalihkan kepemilikan kawasan hutan kepada pelaku ekonomi masyarakat, cara terbaik untuk mengembangkan perhutanan sosial bagi masyarakat adalah dengan memberikan peluang pengelolaan hutan yang mencakup insentif bagi praktik bisnis berkelanjutan dan pelestarian hutan. Pengelolaan usaha (seperangkat kegiatan yang mendukung pertumbuhan usaha), pengelolaan kelembagaan (seperangkat upaya optimalisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial melalui penguatan organisasi, penetapan peraturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia), dan pengelolaan kawasan (seperangkat prasyarat kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan Perhutanan Sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan) merupakan strategi utama pengembangan Perhutanan Sosial dan kelola usaha (rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja Perhutanan Sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab).

Perhutanan sosial mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu hak (*rights*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*). Ini berarti bahwa masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program perhutanan sosial dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

Berbagai model perhutanan sosial telah diterapkan di Indonesia, termasuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Setiap model memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan konservasi sumber daya alam serta berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal (Rahayu, E. M., & Triwano, J., 2021). Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, terdapat beberapa skema dalam pelaksanaan Perhutanan sosial:

1. Hutan Desa (HD), yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas hutan produksi.
4. Hutan Adat (HA), yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Kemitraan Kehutanan (KK), yaitu kerja sama dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dan pihak lain

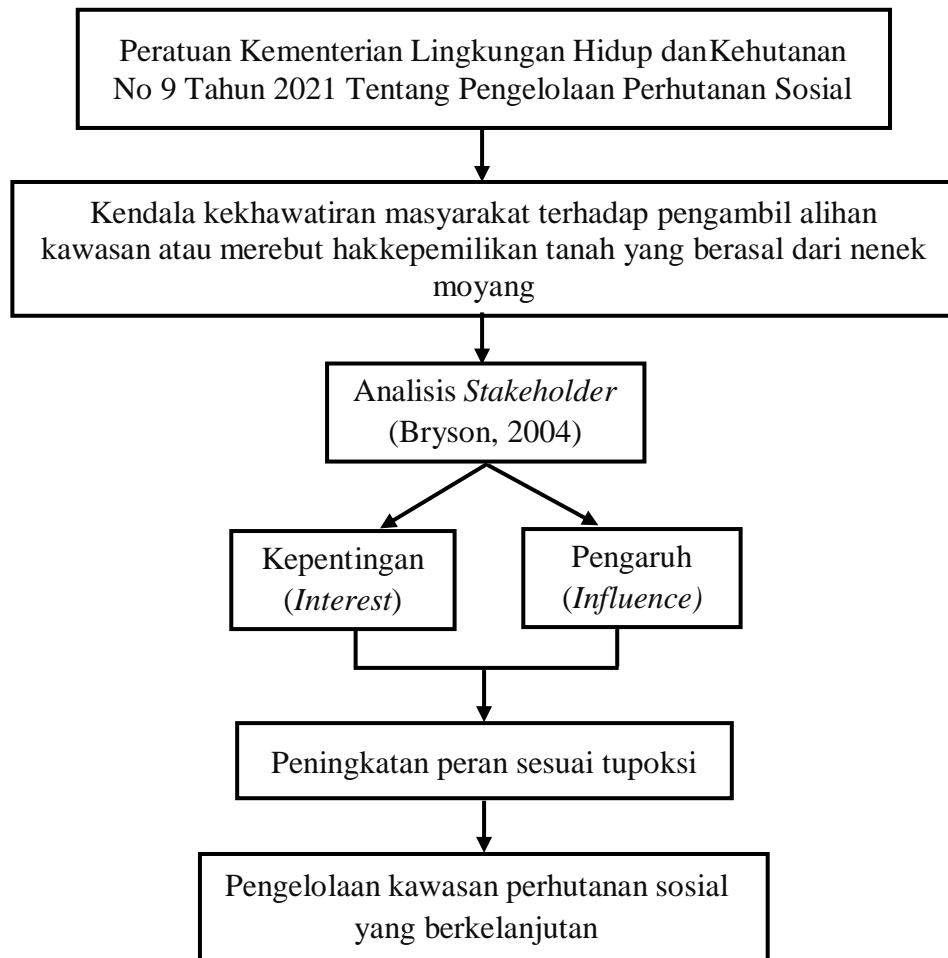
## 2.6. Kerangka Pikir

Kerusakan hutan tidak mungkin dapat dihentikan tanpa dibangunnya kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap hutan. Dengan kata lain keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan (Banuwa et.al., 2018). Kebijakan Perhutanan Sosial diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Program ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan, termasuk pemanfaatan kawasan hutan dan komoditasnya, serta peluang untuk membentuk kelompok usaha untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani merupakan salah satu otoritas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung. Beberapa kendala masih ditemui di Desa Triharjo, seperti masyarakat kurang berminat untuk bergabung dengan perhutanan sosial karena kekhawatiran masyarakat terhadap pengambil alihan kawasan atau merebut hak kepemilikan tanah yang berasal dari nenek moyang.

Implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) tentunya melibatkan berbagai pihak yang disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki andil dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, keterlibatan *stakeholder* sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan kehutanan. Perlu adanya kerjasama yang baik antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengidentifikasi siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan menganalisis peran *stakeholder* berkaitan dengan apa saja yang dilakukan *stakeholder*, metode analisis menggunakan matriks kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influnce*) dengan mengkategorikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject dan crowd* (Bryson, 2004).

Peneliti akan menggambarkan skema kerangka konsep dalam kaitannya peran stakeholder dalam impementasi kebijakan Perhutanan Sosial agar dapat mempermudah arah penelitian skripsi ini.



**Gambar 3. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024*

### **III. METODE PENELITIAN**

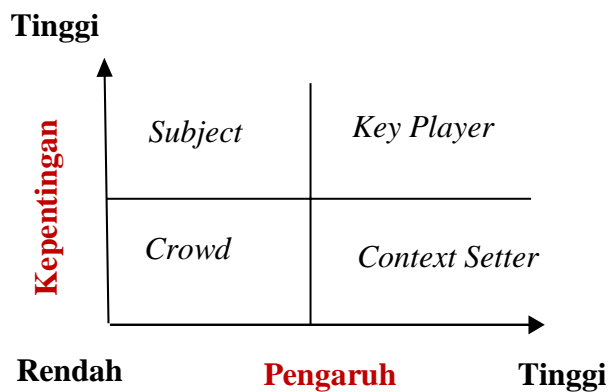
#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berupa data deskriptif yang dikumpulkan dari data tertulis dan dokumen yang dibuat dari narasumber atau informan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya agar mudah dipahami, dan temuannya dapat diberikan kepada orang lain (Hardani dkk, 2020). Dengan menghasilkan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai potret kondisi suatu lingkungan alam mengenai apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada pada subjek kajian, maka pendekatan kualitatif berupaya memahami kondisi tertentu dalam suatu konteks (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Metode penelitian ini dipilih karena memungkinkan analisis yang rinci tentang kepentingan serta pengaruh baik individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, selain itu juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan konteks yang spesifik mengenai keterlibatan dan interaksi setiap *stakeholder* dalam implementasi program Perhutanan Sosial (PS) KPH Gedong Wani di Desa Triharjo, Lampung Selatan.

### 3.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis siapa saja yang menjadi *stakeholder* dan bagaimana peran *stakeholder* dalam implementasi perhutanan sosial di KPH Gedong Wani desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Bryson untuk memperjelas peran masing-masing *stakeholders* dapat menggunakan matriks kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dengan membedakan *stakeholders* ke dalam beberapa kategori *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd* dalam implementasikebijakan perhutanan sosial.



**Gambar 4. Matriks Kepentingan (*Interest*) vs Pengaruh (*Influence*)**

*Sumber: Bryson (2004)*

Dari pendekatan matriks dua kali dua di atas, untuk melakukan pemetaan *stakeholder*, maka dilakukan analisis dengan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis Kepentingan *stakeholder* dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Keterlibatan *stakeholder*
  - 2) Manfaat pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) bagi *stakeholder*
  - 3) Kewenangan *stakeholder*
  - 4) Ketergantungan *stakeholder*

2. Melakukan analisis Pengaruh *stakeholder* dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Kekuatan *stakeholder*
  - 2) Kelayakan *stakeholder*
  - 3) Kompensasi *stakeholder*
  - 4) Kekuatan organisasi *stakeholder*

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan di lakukan dalam mencari data yaitu di Desa Triharjo yang berada di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian peneliti juga mencari sumber informasi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani dan Kelompok-Kelompok Tani Hutan di Desa Triharjo.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis Data**

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh, menurut Sugiyono (2019) membedakan dua jenis sumber data: data primer, yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Perlu dilakukan pengolahan kembali data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan sumber tersebut. Sumber yang tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data disebut data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber seperti literatur dan dokumen yang mungkin membantu dalam studi.

#### **3.4.2. Sumber Data**

- 1) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, memberikan gambaran sebenarnya tentang suatu peristiwa,



menilai, dan memahami perilaku manusia. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan peran *stakeholder* dalam implementasi perhutanan sosial. Tempat penelitian yaitu di KPH Gedong Wani Desa Triharjo, Lampung Selatan. Dalam hal ini, teknik yang peneliti gunakan dalam observasi adalah observasi terstruktur. Berikut merupakan kegiatan observasi yang peneliti lakukan:

**Tabel 3. Observasi Penelitian**

No	Lokasi Observasi	Kegiatan Observasi
1	Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan.	Peneliti melakukan pengamatan terkait dengan budidaya lebah-lebah madu produk KUPS Malantri oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Lancar yang merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Desa Triharjo, yang di mana lebah dibudidayakan dengan menggunakan kotak-kotak lebah di lahan perkebunan. Bibit lebah didapati dari bantuan SSF.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024*

## 2) Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang paling populer menurut Sarosa adalah wawancara (Zhahara, 2021). Orang atau individu yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian dan benar-benar mengetahui serta memahaminya disebut dengan informan. Karena peneliti sangat terikat dengan elemen kontekstual ketika menggunakan metodologi penelitian kualitatif, pengambilan sampel dalam hal ini mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai sumber terkait dengan implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Triharjo, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan data yang detail dan spesifik. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada informan yang berkaitan/menjalankan

langsung kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di lapangan, informan yang mampu menggambarkan suatu kejadian, dan bersedia untuk diwawancari untuk diminta informasinya. Adapun jumlah informan terdiri dari 15 narasumber dalam proses wawancara yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi
1	Dwi Maylinda, S.Hut., M.Si	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
2	Jajang Suparman, S. Hut	Penyuluh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Desa Triharjo <i>resort</i> Katibung	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
3	Amin	a. Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Lancar b. Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Malantri <i>Bee Farm</i>	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
4	Suroto	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Tempel Makmur	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
5	Edi	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Serba Guna	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
6	Rukun	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Manggih Sari II	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
7	Sulam	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Manggih Sari I	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
8	Walyanto	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH)H Bina Sentosa	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
9	Yakino	Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sri Rejeki	Perannya dalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
10	Erwin	Pendamping Proyek <i>Strengthening of Social Forestry</i> (SSF) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo

11	Santoso	Kepala Desa Triharjo	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
12	Ihwan Nussofa, S. Pd.I	Sekretaris Desa Triharjo	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
13	Wahyudi	Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
14	Purwanto	Ketua Gapoktanhut Wana Barokah	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo
15	Isna	Staf Bidang Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih-Way Sekampung (WSS)	Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024*

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, serta dokumen lain yang menyokong penelitian.

**Tabel 5. Dokumentasi Penelitian**

No	Dokumen Penelitian
1	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
2	Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3	PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang kebijakan Perhutanan Sosial

---

5	Surat Keputusan KUPS Malantri <i>Bee Farm</i>
6	Buku dan Jurnal Ilmiah mengenai kebijakan kehutanan, peran <i>stakeholder</i> , perhutanan sosial dan topik lain yang relevan

---

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024*

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses guna memperoleh data mentah yang telah didapatkan oleh peneliti dan selanjutnya akan diolah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Analisis data memiliki banyak sisi dan pendekatan, mencakup beragam teknik seperti yang di ungkapkan oleh Miles & Huberman dalam Saleh (2017) bahwa terdapat empat tahap dalam melakukan analisis data.

#### 1) Pengumpulan Data

Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua komponen yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan yang bersifat alamiah, (catatan yang menggambarkan apa yang peneliti lihat, dengar, saksikan dan alami sendiri tanpa ada pendapat dan penafsiran dari peneliti mengenai kejadian yang dialaminya. Selain sebagai informasi untuk rencana pengumpulan data pada tahap berikutnya, catatan reflektif juga digunakan sebagai catatan reflektif. mencakup pemikiran, pengamatan, pendapat, dan interpretasi peneliti mengenai temuannya.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun data dan melakukan analisis yang memperjelas, mengklasifikasikan, memfokuskan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan sehingga peneliti dapat lebih mudah membuat kesimpulan tentang temuan pekerjaannya.

#### 3) Penyajian Data

Tabel, grafik, gambar, dan kata-kata tertulis semuanya dapat digunakan untuk menyajikan data. Menggabungkan informasi untuk menggambarkan keadaan yang terjadi adalah tujuan penyajian data. Dalam hal ini, peneliti harus menghasilkan narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan pemahaman informasi atau data sehingga peneliti tidak kesulitan memahami informasi secara keseluruhan atau bagian

tertentu dari temuan penelitian.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Proses penelitian melibatkan penarikan kesimpulan. Mirip dengan proses reduksi data, kesimpulan awal dibuat setelah data terkumpul cukup, dan kesimpulan akhir dibuat setelah data terkumpul seluruhnya.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, mula-mula peneliti akan melakukan pengumpulan data atau *data collection* mengenai kebijakan Perhutanan Sosial (PS), lokasi penelitian, dan informasi keseluruhan *stakeholder-stakeholder* yang terlibat dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo baik yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Setelah itu, peneliti akan mereduksi data-data yang telah didapatkan, yaitu dengan melakukan pengkodean/kodefikasi, pemilahan atau klasifikasi data-data yang berkaitan dan mendukung tema penelitian. Kemudian, setelah data direduksi, peneliti akan menyajikan data dan informasi baik dalam bentuk narasi, tabel maupun gambar pada hasil dan pembahasan penelitian untuk memberikan gambaran/temuan penelitian. Setelah 3 tahap tersebut dilakukan, peneliti melakukan tahap penarikan kesimpulan sementara dengan analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan penarikan kesimpulan akhir berdasarkan data yang disajikan.

### 3.6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian adalah valid. Menurut Sugiyono (2019) pemeriksaan keabsahan data dikembangkan empat indikator, yaitu:

#### 1) Validitas internal (kredibilitas)

Memperluas observasi, meningkatkan ketekunan penelitian, triangulasi, percakapan dengan rekan kerja, analisis kasus negatif, dan verifikasi anggota adalah beberapa metode yang digunakan untuk melakukan uji kredibilitas (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif.

## 2) Validitas Eksternal (Transferability)

Dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal dikenal dengan istilah transferability. Tingkat keakuratan atau relevansi temuan penelitian dengan populasi yang dijadikan sampel ditunjukkan oleh validitas eksternal. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada penggunaannya, namun validitas nilai transfer tetap dapat menjadi pertimbangan ketika penelitian dapat diterapkan dalam banyak konteks dan situasi sosial.

## 3) Dependability (Reliabilitas)

Penelitian yang reliabilitas atau dapat dipercaya adalah ketika beberapa percobaan dilakukan dan secara konsisten menghasilkan temuan yang sama. Penelitian dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan metodologi yang sama dan menghasilkan temuan yang sama.

## 4) Konfirmabilitas (Objektivitas)

Uji konfirmabilitas penelitian merupakan nama lain dari objektivitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasil penelitiannya telah disepakati oleh lebih banyak orang. Pengujian temuan penelitian yang dihubungkan dengan prosedur yang telah digunakan disebut dengan pengujian konfirmabilitas. Penelitian telah memenuhi persyaratan konfirmabilitas jika temuannya merupakan hasil langsung dari metodologi yang digunakan.

Dalam memeriksa keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam istilah sehari-hari, triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Teknik triangulasi yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berikut merupakan temuan penelitian yang dapat peneliti simpulkan:

1. *Stakeholder* utama yang terlibat dalam implementasi program Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo Lampung Selatan terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, *Strengthening of Social Forestry (SSF) Project*, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung (WSS), Pemerintah Desa Triharjo, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Triharjo yang terdiri dari 7 kelompok tani, yaitu KTH Maju Lancar, KTH Tempel Makmur, KTH Serba Guna, KTH Manggih Sari I, KTH Manggih Sari II, KTH Bina Sentosa dan KTH Sri Rejeki.
  
2. Berdasarkan model analisis *stakeholder* Bryson (2004) yang peneliti gunakan, berikut merupakan *stakeholder mapping* dalam implementasi program Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo, Lampung Selatan, yaitu:
  - a. *Key Players* (Kepentingan dan Pengaruh Tinggi)  
*Stakeholder key players* ialah KPH Gedong Wani, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Pemerintah Desa Triharjo selaku pemeran utama dari adanya kebijakan Perhutanan Sosial (PS). Memiliki otoritas yang besar dan berperan sebagai fasilitator utama.
  - b. *Context Setter* (Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi)  
*Stakeholder context setter* ialah *Strengthening of Social Forestry (SSF) Project* dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung (WSS). Mereka berperan sebagai katalis, distributor anggaran,

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Namun, keduanya memiliki keterbatasan, SSF hanya sebatas proyek dan keterlibatan BPDAS WSS cenderung teknis, sehingga tingkat keterlibatan atau pendekatan kepada masyarakat rendah.

c. *Subject* (Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah)

*Stakeholder subject* ialah Gapoktan dan Masyarakat lokal yang tidak menjadi bagian dari Kelompok Tani Hutan (KTH) dan tidak tergabung dalam program Perhutanan Sosial (PS). Gapoktan memiliki kepentingan langsung terhadap hasil dari pengelolaan hutan. Sedangkan masyarakat lokal memiliki peran mereka tidak langsung yaitu pendukung yang dapat memperkuat atau melemahkan upaya pelaksanaan kebijakan

d. *Crowds* (Kepentingan dan Pengaruh Rendah)

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Triharjo, tidak ditemukan adanya *stakeholder* yang termasuk dalam kategori *crowds*.

3. Keberhasilan Faktor pendukung implementasi kebijakan Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo meliputi koordinasi yang baik antara KPH Gedong Wani, Pemerintah Desa Triharjo, dan kelompok tani hutan, serta pemahaman regulasi kehutanan yang kuat oleh aparat desa yang mempermudah interaksi antar pihak. Dukungan dari *Strengthening of Social Forestry (SSF) Project* melalui pendampingan dan bantuan bibit lebah juga memperkuat keberhasilan program. Sumber daya manusia yang terlibat, seperti penyuluh dan pendamping, memberikan dampak positif dalam pemahaman masyarakat. Namun, faktor penghambat utama adalah adanya masyarakat yang enggan bergabung dengan program Perhutanan Sosial, terutama mereka yang sudah terlanjur tinggal di kawasan hutan dan skeptis terhadap manfaat program. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat oleh media juga menyebabkan kesalahpahaman dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap program ini.



## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut merupakan saran yang dapat peneliti berikan:

a. Saran bagi *Stakeholder Key Player*

Diharapkan agar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Pemerintah Desa Triharjo dapat melakukan sosialisasi lebih insentif, adakan lokakarya bulanan yang dihadiri oleh perwakilan *stakeholder* dan masyarakat desa dengan agenda membahas skema perhutanan sosial di Desa Triharjo. Hal ini untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat yang masih khawatir terhadap potensi pengambilalihan lahan.

b. Saran bagi *Stakeholder Context Setter*

Diharapkan agar pihak *SSF Project* dan BPDAS WSS dapat meningkatkan pendekatan partisipatif dan kolaborasi kelembagaan dengan mengadakan pertemuan lokakarya secara rutin kepada kelompok tani. *SSF Project* dan BPDAS WSS juga dapat memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

c. Saran bagi *Stakeholder Subject*

Diharapkan agar Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani Hutan) dapat memperkuat komunikasi yang dijalin menghidupkan partisipasi masyarakat agar aktif terlibat dalam program Perhutanan Sosial (PS) dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan implementasi program PS. Kemudian untuk masyarakat lokal dapat terbuka dan mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan dengan turut terlibat dan bergabung dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Desa Triharjo,

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Tiar Arsyad, .S. (2022, Juni). *Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Kualitas Mahasiswa*. *Jurnal Al Azhar*, Vol 03(2), 88-97.
- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1(1), 1-11.
- Azwar, E. (2019, Oktober). *Program Pengalaman Lapangan (Magang) Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan DanRekreasi*. *Jurnal Penjaskesrek*, vol 6(2), 1-11.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). Diakses 23 September 2023, dari <https://lampung.bps.go.id/indicator/60/211/1/luas-kawasan-hutan-menurut-fungsinya.html>
- Banuwa IS, Safe'i R, Febryano IG dan Novayanti D. 2018. *Strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di KPH Gedong Wani*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(1): 29-38.
- Brysson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques*. *Public Management Review*, 6(1), 21–53.
- Djodi Setiawan, N. C. (2020, Januari-April). *Pengaruh Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada PT. Satwa Prima Utama*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 11(1), 55-64.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications*. *Academy of Management Review* Vol. 20, No. 1 , 65-91.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Jurnal Humanika*, Vol 21(1), 33-54.
- Febrianti, I. A. (2020). *Bentuk Pintu Masuk Sarang Trigona Spp Di Kawasan Hutan Mangrove Surya Perdana Mandiri Kelurahan Setapak Besar Singkawang Utara*. *Jurnal Hutan Lestari*, Vol 8(3), 620-627.

- Hakim, Ismatul et al. (2010). *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Hardani, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (H. Abadi, Ed.) Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hardiansyah, Gusty. 2012. *Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang*. Pontianak: *Jurnal Fakultas Kehutanan Untan*. Vol. 8, No.3: 186-194.
- Hastanti & Raharjo. (2021, Juni). *Analisis Para Pihak Pada Implementasi Program Perhutanan Sosial Di Kph Telawa, Jawa Tengah*. Surakarta: *Jurnal Wasian* Vol.8 No.1 Tahun 2021:11-23.
- Hidayah, Ni'mah A. (2019). *Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).
- Huda, M. F. (2021). *Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Irmadella, A. (2018). *Model kolaborasi stakeholders dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Izza mafruhah, N. i. (2021). *Aplikasi Alat Analisi Kontemporer Berbasis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (<https://gokups.menlhk.go.id/public/home>)
- Kumala, G. B. W. N., Raharjo, A. N., Musleh, M., Lubis, L. (2024). Model Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 10 (2).
- Kustriani, Sri Hadiati Wara. (2015). *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*. Jakarta: Pusaka LAN.
- Kualitatif, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian*. *Jurnal Humanika*, Vol 21(1), 33-54.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CV Mitra Ilmu.
- M. Zakki Abdillah, E. L. (2022). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Disposisi Surat Berbasis Web Di Universitas Nasional Karangturi*.

*Science Technology and Management Journal*, Vol 2(2), 62-70.

- Maghfirullah, H. M. (2018, Juli). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. pp. 1-10.
- Mulyono. (2009). *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Diakses 8 Oktober 2023, dari <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Nazmi Haddyat Tamara. (2020). *Survei Dan Indeks Perhutanan Sosial: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat Dan Kelestarian Hutan*. Katadata Insight Center, 12-2020, 1-62.
- Nindya Tria Puspita, R. Q. (2020, Januari). *Modal Sosial Masyarakat Pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi*. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol 8(1), 54-64.
- Novayanti D, Banuwa IS, Safe'i R, Wulandari C dan Febryano IG. 2017. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat pada KPH Gedong Wani*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9 (2):61-74.
- Nugroho, Annatasta et al. 2020. *Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*. Semarang: *Jurnal Undip*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Purwanto, N. A. (2020). *Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik di Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Intishar Publishing Yogyakarta.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 548-558.
- Ravyansah et al. (2022). *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Global.
- Saleh, Sirajuddin (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia.
- Sari, Dewi Rafika. (2019). *Pengelolaan Kawasan Hutan Masalah Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung*. Diakses 26 September 2023, dari [https://www.academia.edu/46749058/pengelolaan\\_kawasan\\_hutan\\_masalah\\_perhutanan\\_sosial\\_di\\_provinsi\\_lampung](https://www.academia.edu/46749058/pengelolaan_kawasan_hutan_masalah_perhutanan_sosial_di_provinsi_lampung)
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. (B. Sarwiji, Ed.) Jakarta: Indeks.
- Septiani, NJ, Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2021). Proses Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Pariwisata Di Desa Pantai

- Karang Jahe Desa Punjulharjo Rembang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10 (2), 133-146.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127-144.
- Siregar, N. (2022, Agustus). *Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 1(7), 713-722.
- Situmorang, Jimmy Enmo S. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant. Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulastri. (2017). *Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suyitno. (2020, Februari). Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Akademika*, Vol 18(1), 49-57.
- Tasya Moedy Agusti, I. N. (2019, Januari). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 4(2), 300-309.
- Thomas Donaldson and Lee E Preston, "The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications And From The Specific Comments Of Many People, Including Professors Aupperle," *Academy of Management Review* 20, no. 1 (1995): 65–91.
- Zhahara Yusra, R. Z. (2021, Juni). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Lifelog Learning*, Vol 4(1), 15-22.